

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dimana sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat ke pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Sebagai salah satu bagian dari organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penilaian dari kinerja ini menjadi sorotan dari berbagai pihak dan terlebih lagi adanya otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan yang ada di daerahnya. Adanya otonomi daerah ini di atur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintah yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka perlu meningkatkan kualitas

pelaksanaan kinerja manajerial, instansi pemerintah membuat penetapan kinerja manajerial secara berjenjang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu capaian yang baik, melalui penetapan target kinerja manajerial, serta indikator kinerja manajerial yang menggambarkan pencapaiannya baik berupa keberhasilan maupun manfaat.

Secara umum, kinerja diartikan sebagai suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Bastian (2008) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Kinerja manajerial kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 1963 dalam Dzillan 2010). Weihich dan Koontz (2005) dalam Khalida Sari (2016) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja manajer dalam mengerti dan memahami fungsi manajer dalam mencapai sasaran kerjanya, yang diukur bagaimana manajer tersebut menjalankan aktivitas manajerialnya seperti *planning*, *organizing*, *staffing* dan *controlling*. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Sedarmayanti 2008).

Menurut Supomo dan Indriantoro (2008) bahwa Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial OPD antara lain perencanaan, koordinasi, prediksi ketidakpastian lingkungan, staffing, negosiasi, kejelasan sistem akuntansi manajemen, pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia dan representasi. Bagi organisasi itu sendiri kinerja manajerial dapat menjadi tolak ukur sejauh mana manajer melaksanakan fungsi manajemen. Dalam penelitian Eka Widyaningtiyas (2014) disebutkan jika pengendalian intern lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan sangat besar. Oleh sebab itu dalam lingkup pemerintah diperlukan sistem pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap Undang-undang dan aturan yang berlaku.

Menurut Marzuki (2013) Fungsi dari pengendalian akan dapat menciptakan suatu peningkatan kinerja atas pelaksanaan masing masing fungsi manajemen lainnya. Efektifitas pengendalian intern akan dapat tercapai apabila pelaksanaan semua prosedur, metode dan teknik yang menjadi ensure (kepastian) dari sistem itu sendiri sesuai dengan semestinya. Disinilah peningnya peran pengendalian intern yang mempunyai tugas meneliti dan mengawasi secara kontinyu terhadap pelaksanaan organisasi dan perkembangan organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Manajemen perlu memiliki kemampuan untuk melihat peluang, mengidentifikasi masalah, menyeleksi, mengimplementasi proses adaptasi dengan tepat, berkewajiban mempertahankan kelangsungan hidup dan mengendalikan organisasi didalam pencapaian tujuan organisasi.

Secara umum fenomena yang muncul di SKPD yang ada di Kabupaten Natuna salah satunya dapat dilihat dari hasil Audit BPK dimana penatausahaan Kas Umum Daerah Kabupaten Natuna tidak sesuai dengan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Natuna dengan penyajian Tabel I.1 sebagai berikut.

Tabel I.1
Opini BPK atas LKPD Kabupaten Natuna

Tahun	Opini BPK
2012	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2013	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2014	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2016	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : www.bpk.go.id, 2017

Fenomena yang ditemukan di SKPD Kabupaten Natuna adalah masih lemahnya pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan hal ini berakibat pada kualitas laporan keuangan daerah sehingga opini Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna yang diberikan BPK dari tahun 2014-2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). WDP yang diterima Kabupaten Natuna disebabkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang kurang. Kemudian laporan sistem pengendalian intern yang tidak lengkap hingga laporan kepatuhan terhadap laporan perundangan yang tidak menyajikan data yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Natuna menurut hasil audit BPK untuk tahun 2016 antara lain : Persiapan Pemerintah Kabupaten Natuna menuju penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai, pengelolaan piutang pajak pada Dinas Pendapatan Daerah tidak memadai, Pemerintah Kabupaten Natuna belum melakukan validasi atas piutang BPHTB dan PBB secara optimal, nilai piutang retribusi IMB tidak dapat diyakini kewajarannya, nilai investasi non permanen tidak dapat diyakini kewajarannya, nilai aset tetap sebagian belum didukung dengan dokumen sumber yang memadai dan penatausahaan aset tetap belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pengelolaan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum memadai.

Fenomena secara khusus dalam penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari TA 2012-2015 atas LKPD Kota Pekanbaru dengan penyajian Tabel I.2 sebagai berikut

Tabel I.1
Opini yang diperoleh OPD Kota Pekanbaru

No	Tahun	Opini
1.	2012	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2.	2013	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
3.	2014	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
4.	2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : <http://pekanbaru.bpk.go.id>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pekanbaru untuk TA 2012 sampai dengan 2015. Opini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kota Pekanbaru pada tahun-tahun sebelumnya. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK pada TA 2012 yaitu terdapat permasalahan salah satunya pengelolaan aset milik Pemko Pekanbaru yang amburadul, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun 2012 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tidak hanya aset penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pekanbaru juga tidak jelas. Pada TA 2013 yaitu terdapat permasalahan diantaranya (1) Piutang Retribusi. penyajian piutang retribusi dalam neraca per 31 Desember 2013, diantaranya merupakan piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB). Sebagian nilai piutang retribusi IMB tersebut tidak didasarkan kepada pengawasan/pemeriksaan fisik, tidak didukung dengan bukti yang memadai dalam perhitungan dan penetapan. (2) Investasi permanen. Penyajian investasi permanen dalam neraca per 31 Desember 2013 merupakan penyertaan modal pada enam BUMD yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Aset Tetap. Penyajian sebagian nilai aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2013 tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai tentang rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi dan nilai perolehan.

Selain itu BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern, diantaranya adalah (1) Persiapan Pemerintah Kota Pekanbaru menuju penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai. (2) Penatausahaan kas umum daerah tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah. (3) Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah Trans Metro Pekanbaru (BLUD TMP) belum sesuai dengan ketentuan. (4) Pengelolaan piutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak pada Dinas Pendapatan Daerah tidak memadai. (5) Pemerintah Kota Pekanbaru belum melakukan validasi atas piutang BPHTB dan PBB secara optimal. (6) Nilai piutang retribusi IMB tidak dapat diyakini kewajarannya. (7) Nilai investasi non permanen tidak dapat diyakini kewajarannya. (8) Nilai aset tetap sebagian belum didukung dengan dokumen sumber yang memadai dan penatausahaan aset tetap belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (9) Revitalisasi atas bangunan di tiga SKPD tidak sesuai dengan ketentuan dan nilai aset pada neraca Pemerintah Kota Pekanbaru disajikan Overstated. (10) Pengelolaan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum memadai.

Pada TA 2014 BPK RI menemukan permasalahan pada pengendalian intern diantaranya yaitu: (1) Penyajian piutang pajak reklame tidak akurat. (2) Nilai piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diyakini kewajarannya. (3) Aset tetap Pemerintah Kota Pekanbaru pada neraca per 31 Desember 2014 belum disajikan secara lengkap dan akurat dan (4) Hak Pengelolaan Lahan (HPL) belum tercatat pada neraca Kota Pekanbaru. Begitupun pada TA 2015 terdapat permasalahan diantaranya pada Dinas Bina Marga masih ada aset jalan namun tidak tercatat di pencatatan aset. Sehingga belum ada sinkronisasi antara kondisi di lapangan dengan pencatatan asetnya. Selain di Dinas Bina Marga, masih ada beberapa dinas yang pencatatan asetnya juga belum beres. Seperti Dinas Pendidikan yang belum melaksanakan inventarisasi asetnya. Sementara Hak Pengelolaan Lahan (HPL), masih menjadi catatan BPK RI Perwakilan Riau yang membuat Pemko Pekanbaru masih mendapatkan opini WDP.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang disajikan kepada pihak-pihak luar organisasi telah diatur didalam standar akuntansi, maka pemerintah harus merancang sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan Peraturan Daerah tersebut, untuk mengimplementasikan sistem ini diberlakukan sumber daya manusia (SDM) yang mengerti dan mengoperasikan sistem akuntansi. Suatu sistem tidak mungkin berjalan tanpa adanya keterlibatan manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Pada umumnya sumber daya manusia (SDM), pemerintah daerah yang memiliki sistem akuntansi manajemen masih sedikit dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mempredisi sesuatu yang terjadi di lingkungannya secara akurat dalam kutipan *halloriau.com* seperti perubahan peraturan pemerintah daerah standar akuntansi pemerintah, perubahan pimpinan OPD, perubahan kebijakan tentang kepegawaian, sehingga mengakibatkan pegawai yang belum terbiasa melakukan perubahan tersebut mau tidak mau harus mengikuti perubahan lingkungan yang terjadi.

Pada saat ini Pemko Pekanbaru banyak terjadi mutasi tugas atau pemindahan tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Pemko Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan kutipan *halloriau.com* yang bahwasanya setiap tahun terjadi mutasi atau pemindahan tugas. Diantaranya pada tahun 2015 sebanyak 98 pejabat itu diketahui 28 diantaranya merupakan pejabat eselon II, 2016 sebanyak 36

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat itu diketahui 6 diantaranya merupakan pejabat eselon II, 2017 sebanyak 31 pejabat yang berasal dari eselon III dan IV, dan pada tahun 2018 sebanyak 228 pejabat itu diketahui 11 pejabat eselon II, 25 pejabat eselon IIIA, 53 pejabat eselon IIIB dan 139 pejabat eselon IV yang telah dilantik oleh wakil walikota Pekanbaru. Dari kasus tersebut dapat dilihat dengan terjadinya mutasi atau pemindahan tugas yang dilakukan oleh pejabat setempat akan mempengaruhi kinerja dari pejabat tersebut karena pejabat tersebut harus menyesuaikan diri dari tempat kerja yang lama ke tempat kerja yang baru.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Marzuki (2013) dengan judul Pengaruh pengendalian intern, sistem akuntansi manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada Lembaga keuangan Mikro di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar tetapi pada penelitian ini melakukan penelitian di Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh mengenai ”**Pengaruh Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Manajemen, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial pada OPD Kota Pekanbaru**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.
2. Apakah sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.
4. Apakah pengendalian intern, sistem akuntansi manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengendalian intern, sistem akuntansi manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat akademis

Hasil penelitian diharapkan akan menambah khasanah kepustakaan dan bahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai pengaruh pengendalian intern, sistem akuntansi manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial OPD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat bagi perusahaan

Menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak manajemen instansi pemerintah untuk menentukan seberapa besar pengaruh pengendalian intern, sistem akuntansi manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial OPD.

c. Bagi penulis

Sebagai perbandingan antara teori-teori yang didapat sesuai dengan mata kuliah dan dalam aktivitas perusahaan khususnya pengaruh pengendalian intern, sistem akuntansi manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial OPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan tujuan mempermudah pembahasan serta untuk mempermudah pembaca memahami garis besar penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini merupakan landasan metodologi penelitian, yang merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang mencakup pemilihan sampel, sumber data, variabel penelitian, metode analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Berisi gambaran umum tentang objek penelitian, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas organisasi. Dalam bab ini juga akan dibahas analisis data tentang pengaruh pengendalian intern, sistem akuntansi manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisa kesimpulan yang ditarik dalam bentuk kesimpulan dan sekaligus memberikan saran sebagai masukan kepada perusahaan.